



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 31 Agustus 2021

Nomor : 143/0011801
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tanah Pengganti
Tahap III Tukar Menukar Tanah
Kas Desa Jelok Kecamatan
Cepogo Untuk Pembangunan
Pasar Hewan.

Kepada
Yth. BUPATI BOYOLALI

di -

BOYOLALI

Menunjuk surat sebagai berikut :

- Surat Bupati Boyolali tanggal 22 Juni 2021 Nomor 143/1994/4.10/2021 perihal Rekomendasi Permohonan Pengadaan Tanah Pengganti dan Penggunaan Uang Ganti Rugi Tanah Kas Desa Jelok Tahap III Untuk Pembangunan Pasar Hewan.
- Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2021 Nomor 143/0000829 perihal Persetujuan Penggunaan Sisa Uang ganti Rugi Untuk Membeli Tanah Pengganti Pada Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jelok Untuk Pasar Hewan Cepogo.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat memberikan persetujuan atas permohonan Saudara terhadap penggunaan sisa uang ganti rugi fisik senilai Rp.2.463.230.000,- yang digunakan untuk membeli tambahan tanah pengganti seluas \pm 10.874 m².
2. Tanah pengganti yang telah diperoleh agar dikelola dan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Pembiayaan proses tukar menukar tanah kas desa meliputi biaya operasional sampai dengan biaya pensertifikatan tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa setempat ditanggung sepenuhnya oleh instansi pemohon mendasar pada ketentuan yang berlaku.
4. Dalam proses pelepasan tanah kas desa agar Saudara :
 - a. Bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materil atas dokumen serta penyelesaian tertib administrasi pertanahan sampai terbitnya bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.

- b. Memfasilitasi tukar menukar tanah kas desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
 - c. Memerintahkan Kepala Desa supaya mencatat secara tertib mutasi tanah kas desa sebagai akibat tukar menukar dimaksud pada inventaris kekayaan desa agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
 - d. Bertanggungjawab terhadap prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dengan asas fungsional, kepastian hukum, transJeloki, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai sehingga Pemerintah Desa tidak dirugikan.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud, kepada Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tembusan Gubernur Jawa Tengah.
5. Apabila ternyata dalam pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa dimaksud terjadi ketidaksesuaian antara data pada dokumen yang Saudara sampaikan sebagaimana tersebut di atas dengan fakta di lapangan serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini batal demi hukum.

Demikian untuk perhatian pelaksanaannya dan terima kasih.



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

TEMBUSAN :

1. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.